

## **PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN MAJALENGKA**

**Kartika Berliani**

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun  
Jl. Soekarno Hatta No.448 Bandung

Email : [tiek\\_28@yahoo.co.id](mailto:tiek_28@yahoo.co.id)

### **ABSTRAK**

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan verifikatif dan bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka tahun 2007 s.d. 2014 baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi dan keserasian belanja daerah dengan menggunakan analisis dekriptif, bahwa tingkat kemandirian mempunyai nilai rata-rata sebesar 7,15%. Tingkat efektivitas mempunyai nilai rata-rata sebesar 100.41%. Tingkat efisiensi

mempunyai nilai rata-rata sebesar 95,45%. Tingkat keserasian mempunyai nilai rata-rata sebesar 38,28%. Untuk pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis deskriptif dalam jangka waktu 8 tahun dari tahun 2007-2014 mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,65%. Untuk tingkat kesejahteraan masyarakat dari tahun 2007-2014 mempunyai nilai rata-rata sebesar 70,62%.

Hasil pengolahan data menggunakan metode verifikatif bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara simultan dan berpengaruh positif secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan berpengaruh secara simultan dan berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

**Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun, akan tetapi tujuan utama dari Otonomi Daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut ditandai munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Menurut Mardiasmo (2009:18) "Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan". Dengan demikian akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Baik pemerintah pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Oleh karena itu, pemerintah wajib merespon tuntutan akuntabilitas tersebut di atas.

Selain tuntutan atas akuntabilitas publik, berbagai masalah timbul dalam kaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah. Dimana Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil. Akan tetapi banyak permasalahan timbul dari pertumbuhan ekonomi ini, salah satunya adalah berbagai fenomena tentang kesenjangan yang terjadi dalam suatu wilayah. Dengan adanya kesenjangan ini maka diperlukan cara untuk mengatasi agar kesenjangan tersebut tidak semakin meluas.

Selain itu, kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , serta perluasan lapangan kerja. Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut akan dapat tercapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dan berketrampilan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. "Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya" (Halim,2008:230).

## Analisis Kinerja Keuangan pada Keuangan Daerah

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Widodo (Halim 2008:234) “kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat”. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah (Rondal dan Sarmiyatiningsih,2009: 34) Menurut Mahsun dalam Suyana Utama (2008: 33) Rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Paul Harvey dalam Halim (2010:34) mengemukakan “mengenai pola hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Sebagai pedoman pola hubungan dengan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pedoman penilaian kemandirian keuangan daerah**

Kemampuan Daerah	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Suyana Utama (2008)

### Rasio Efektivitas terhadap PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. “Pendapatan Asli daerah (PAD) efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100 %. Dengan demikian semakin besar rasio efektivitas maka kinerja pemerintahan pun semakin baik” (Halim, 2008: 234).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan berdasarkan nilai efektifitas yang diperoleh dari rumus diatas menurut Mohamad Mahsun (2006:187) seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Pedoman Penilaian Dan Kinerja Efektifitas terhadap PAD**

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
100 - ke atas	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup efektif
60 – 80	Kurang efektif
Dibawah 60	Tidak efektif

Sumber: Mohamad Mahsun 2006

### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Menurut Halim (2008:234) rasio efisiensi keuangan daerah dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3**  
**Pedoman Penilaian Dan Kinerja Efisiensi Keuangan**

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Dibawah 60	Sangat Efisien
60 -80	Efisien
80 – 90	Kurang efisien
90 – 100	Cukup efisien
100 – ke atas	Tidak efisien

Sumber: Mohamad Mahsun 2006

### Rasio-Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja operasi berarti presentase belanja modal/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut (Suyana Utama,2008) :

$$\text{Rasio Kecerasan Belanja} = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut (Mahsun, 2006) :

**Tabel 4**  
**Pedoman Penilaian Kecerasan Belanja Daerah**

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0 - 20	Tidak serasi
20 - 40	Kurang serasi
40 - 60	Cukup serasi
60 - 80	Serasi
80 - 100	Sangat serasi

Sumber: Mohamad Mahsun 2006

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Todaro (1997) dalam Adi (2007) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. *Gross National Product* adalah total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Jadi untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan ekonomi / tahun} = \frac{GNP_t - GNP_{t-1}}{GNP_{t-1}} \times 100$$

Di mana :

Tahun  $t$  = Tahun yang dihitung pertumbuhannya

$GNP_t$  = Gross National Product tahun  $t$

$GNP_{t-1}$  = Gross National Pruduct tahun sebelumnya

Jadi pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitasnya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. "Indikator kesejahteraan suatu daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO<sub>2</sub>, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB)" (Thomas, 2005: 15). Kesejahteraan suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (H), sumber daya fisik (K) dan sumber daya lain (R). Ketiga sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas) akan digunakan untuk dibelanjakan pada barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal. "Golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan mereka" (Todaro, 2003: 252).

Dampak dari krisis ekonomi pada pembangunan manusia adalah dengan menurunnya daya beli dan ini juga berarti terjadinya penundaan upaya peningkatan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual penduduk. Penurunan beberapa komponen IPM sebagai akibat kepekaan IPM sebagai alat ukur yang dapat menangkap perubahan nyata yang dialami penduduk dalam jangka pendek. Untuk menilai hasil pembangunan manusia berdasarkan tinggi rendahnya status pembangunan manusia, maka UNDP membedakan menjadi tiga golongan yaitu :

- a. Tingkatan rendah, jika  $IPM < 50$
- b. Tingkatan menengah, jika  $50 < IPM < 80$
- c. Tingkatan tinggi, jika  $IPM > 80$

Sedangkan berdasarkan kajian aspek tingkat pertumbuhannya, IPM dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan, melalui dua cara yaitu :

- a. Perbandingan antar wilayah, yaitu suatu posisi relatif dari suatu wilayah terhadap wilayah yang lain berdasarkan peringkatnya dalam suatu kawasan tertentu.
- b. Pengukuran tingkat kemajuan, yaitu untuk mengkaji pencapaian tingkat kemajuan capaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode tertentu, yang dinotasikan kedalam rumus *reduksi shortfall* per tahun (*annual reduction shortfall*).

Semakin besar *reduksi shortfall* ( $r$ ) di suatu wilayah menunjukkan semakin besar kemampuan yang dicapai oleh wilayah tersebut untuk meningkatkan pembangunan manusianya. Kecepatan pencapaian dalam hal ini mengukur perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus (seharusnya) ditempuh untuk mencapai titik ideal IPM, yakni  $IPM = 100$

Kecepatan pencapaian =  $r$ , terbagi kedalam 4 tingkatan :

- a. Kecepatan Pencapaian "Sangat Lambat", jika  $r < 1,30$
- b. Kecepatan Pencapaian "Lambat", jika  $1,30 < r < 1,50$
- c. Kecepatan Pencapaian "Menengah", jika  $1,50 < r < 1,70$
- d. Kecepatan Pencapaian "Cepat", jika  $r > 1,70$

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif, dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji variabel X yaitu pengaruh kinerja keuangan terhadap variabel Y yaitu pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap variabel Z yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.



## **1. Metode Analisis Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2012:147), pengertian analisis deskriptif adalah:

Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian dimana penulis turut berpartisipasi dilapangan dengan mencatat segala kejadian, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan untuk dibuatkan laporan hasil penelitiannya.

## **2. Metode Verifikatif**

Analisis verifikatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*), namun sebelum melakukan analisis jalur dilakukan pengujian normalitas data terlebih dahulu.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Deskriptif**

#### **Variabel Kinerja Keuangan**

Analisis terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Majalengka pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten di masa lalu. Dalam penelitian ini, variabel kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Majalengka diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah antara lain dapat dideskripsikan sebagai berikut :

#### **1. Kemandirian (X1)**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Majalengka dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah atau yang sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. PAD memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu PAD diharapkan dapat menjadi bagian terbesar dari seluruh penerimaan daerah dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah kabupaten, karena faktor penting dalam kemampuan

keuangan daerah dapat dilihat dari PAD, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi dapat dikurangi.

Hasil perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Majalengka, tertinggi berada pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,30% dan terendah berada di tahun 2008 sebesar 5.41 %. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio kemandirian daerah Kabupaten Majalengka sebesar 7,15% bila dihubungkan dengan pedoman kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah yaitu mengacu kepada hasil penelitian menurut Suyana Utama (2008), maka persentasenya terletak antara 0 – 25%, dengan demikian rasio kemandirian tergolong dalam kategori kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif, artinya kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka masih didominasi oleh campur tangan Pemerintah Pusat/Provinsi.

## **2. Efektivitas (X2)**

Tingkat efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan pemerintah kabupaten dan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Majalengka.

Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas keuangan tertinggi berada pada tahun 2007 sebesar 101.77% dan rasio efektivitas keuangan terendah berada pada tahun 2008 sebesar 98.83 %. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio efektivitas sebesar 100.41% Bila dihubungkan dengan pedoman penilaian dan kinerja efektivitas mengacu kepada hasil penelitian menurut Suyana Utama (2008), maka hasilnya berada pada skor 100 – atas dan tergolong dalam kategori sangat efektif, artinya Kabupaten Majalengka telah mencapai

tujuan dan sasaran akhir dalam pembangunan daerahnya yang sebelumnya sudah ditetapkan.

### 3. Efisiensi (X3)

Tingkat efisiensi dimaksudkan untuk menilai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Majalengka yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi keuangan tertinggi berada pada tahun 2011 sebesar 97,72 % dan rasio efisiensi keuangan terendah berada pada tahun 2013 sebesar 92,67 %. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 95,45 % Bila dihubungkan dengan pedoman penilaian dan kinerja efisiensi mengacu kepada hasil penelitian menurut Mohamad Mahsun (2006), maka hasilnya berada pada skor 90 – 100 dan tergolong dalam kategori cukup efisien, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka sudah cukup baik menggunakan anggarannya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya

### 4. Kecerahan Belanja (X4)

Tingkat kecerahan belanja menggambarkan bagaimana pemerintah Kabupaten Majalengka memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pelayanan publik secara optimal sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakatnya.

Hasil perhitungan rasio kecerahan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio kecerahan belanja tertinggi berada pada tahun 2007 sebesar 47,79 % dan rasio kecerahan belanja terendah berada pada tahun 2010 sebesar 29,06 %. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio kecerahan belanja sebesar 38,28 % Bila dihubungkan

dengan pedoman penilaian keserasian belanja mengacu kepada hasil penelitian menurut Mohamad Mahsun (2006), maka hasilnya berada pada skor 20 – 40 dan tergolong dalam kategori kurang serasi. Hal ini disebabkan tingginya realisasi belanja daerah secara keseluruhan seperti belanja aparatur daerah, belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan yang jumlahnya tidak signifikan dan jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Majalengka memang sejak awal telah memiliki komitmen yang tinggi untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan semakin meningkatnya alokasi dana melalui APBD untuk belanja pelayanan publik. Tetapi realita yang terjadi adalah peningkatan alokasi dana belanja pelayanan publik tidak signifikan dengan alokasi dana pada pos-pos belanja langsung, yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

#### **5. Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Y)**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan laju pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin bagus. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka dalam jangka waktu 8 tahun, nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di tahun 2007 dan tahun 2014 sebesar 4,87% dan nilai pertumbuhan ekonomi terendah berada di tahun 2014 sebesar 4,11%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu 8 tahun dari tahun 2007-2014 sebesar 4,65%. Secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dari hasil PDRB Kabupaten Majalengka dari tahun 2007-2014 mengalami turun naik. Menurut Alexiou (2009), bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja modal pemerintah, belanja konsumsi pemerintah, investasi swasta, tenaga kerja, perdagangan bebas, serta bantuan luar negeri. Penelitian Darwanto dan Yustikasari menemukan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Rahayu (2004) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **6. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Variabel Z)**

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka dalam jangka waktu 8 tahun meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat tertinggi berada di tahun 2014 sebesar 72,54% dan tingkat kesejahteraan masyarakat terendah berada di tahun 2007 sebesar 68,94%. Rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu 8 tahun dari tahun 2007-2014 sebesar 70,62%.

Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Majalengka jelas dipengaruhi oleh pendapatan domestik regional bruto yang berasal dari sektor-sektor perekonomian produktif yang ada, seperti kegiatan perdagangan dan jual beli barang, usaha pertanian misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, berternak dan budi daya hasil perkebunan yang dapat mendatangkan penghasilan bagi masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Majalengka juga menjelaskan bahwa setiap masyarakat dapat memiliki akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi berupa pemerataan pendapatan dan tingkat daya beli dan adanya partisipasi masyarakat di dalam kegiatan ekonomi produktif sehingga masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.

Tingkat pendidikan memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka yang dapat mengenyam dunia pendidikan sehingga dampaknya adalah mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperoleh pendidikan yang memadai, maka akan mempengaruhi peningkatan kemampuan dasar manusia seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial politik dan aspek kehidupan lainnya, serta mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (penduduk) sebagai obyek pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah Kabupaten Majalengka yang dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.

Peningkatan usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Majalengka diindikasikan bahwa derajat kesehatan warga masyarakat yang tercermin lewat umur panjang dan akses mendapatkan hidup yang sehat semakin lebih baik dari tahun

ke tahun. Tantangan pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka saat ini adalah bagaimana mengurangi angka kemiskinan, investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Langkah ini akan lebih berarti bagi masyarakat di Kabupaten Majalengka, karena dengan adanya kesehatan murah dan fasilitas pendidikan akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera.

### **Pengaruh Kinerja Keuangan (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) secara simultan**

Berdasarkan hasil olah data diatas kerangka hubungan antara jalur ( $X_1, X_2, X_3, X_4$  terhadap Y) dapat dibuat melalui persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y = \rho_{yx1}X_1 + \rho_{yx2}X_2 + \rho_{yx3}X_3 + \rho_{yx4}X_4 + \rho_{y\epsilon1}$$

Diperoleh hasil untuk :

$$R^2_{yx1.x2.x3.x4} = 0.902$$

$$\rho_{y\epsilon1} = 1 - R^2_{yx1.x2.x3.x4} = 1 - 0,902 = 0,098$$

Berdasarkan diagram persamaan jalur diatas menunjukkan bahwa :

- Besarnya pengaruh antara variabel kemandirian ( $X_1$ ), variabel Efektivitas ( $X_2$ ), variabel Efisiensi ( $X_3$ ) dan variabel Keserasian Belanja ( $X_4$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) yaitu sebesar 0,902.
- Besarnya pengaruh faktor-faktor lain diluar variabel kemandirian ( $X_1$ ), variabel Efektivitas ( $X_2$ ), variabel Efisiensi ( $X_3$ ) dan variabel Keserasian Belanja ( $X_4$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah sebesar 0.098.

Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut :

$$H_a : \rho_{yx1} = \rho_{yx2} = \rho_{yx3} = \rho_{yx4} \neq 0$$

$$H_o : \rho_{yx1} = \rho_{yx2} = \rho_{yx3} = \rho_{yx4} = 0$$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

H<sub>a</sub>: Kinerja keuangan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

H<sub>o</sub>: Kinerja keuangan tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kriteria uji sebagai berikut :

- Jika  $F_{hit} \geq F_{tabel}$  dengan taraf signifikan 5% maka H<sub>o</sub> ditolak artinya signifikan
- Jika  $F_{hit} \leq F_{tabel}$  dengan taraf signifikan 5% maka H<sub>o</sub> diterima artinya tidak signifikan

Atau :

- Jika nilai probabilitas 0,05 *lebih kecil* atau *sama dengan* nilai probabilitas *Sig* atau ( $0,05 \leq Sig$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak signifikan.
- Jika nilai probabilitas 0,05 *besar* atau *sama dengan* nilai probabilitas *Sig* atau ( $0,05 \geq Sig$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya signifikan.

Diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 6,932 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari  $df_1$  (4) dan  $df_2$  (3) adalah 6,59. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  dan jika dilihat dengan nilai probabilitas ( $sig$ ) = 0.002, karena nilai  $sig < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak yang artinya signifikan, dan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

### **Pengaruh Kinerja Keuangan (X) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Z) Secara Simultan**

Berdasarkan hasil olah data diatas kerangka hubungan antara jalur ( $X_1, X_2, X_3, X_4$  terhadap Z) dapat dibuat melalui persamaan struktural sebagai berikut :

$$Y = \rho_{zx1}X_1 + \rho_{zx2}X_2 + \rho_{zx3}X_3 + \rho_{zx4}X_4 + \rho_{z\epsilon_2}$$

Diperoleh hasil untuk :

$$R^2_{zx1.x2.x3.x4} = 0.985$$

$$\rho_{z\epsilon_2} = 1 - R^2_{zx1.x2.x3.x4} = 1 - 0,985 = 0,015$$

Berdasarkan diagram persamaan jalur diatas menunjukkan bahwa :

- Besarnya pengaruh antara variabel kemandirian ( $X_1$ ), variabel Efektivitas ( $X_2$ ), variabel Efisiensi ( $X_3$ ) dan variabel Keserasian Belanja ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ( $Z$ ) yaitu sebesar 0,985.
- Besarnya pengaruh faktor-faktor lain diluar variabel kemandirian ( $X_1$ ), variabel Efektivitas ( $X_2$ ), variabel Efisiensi ( $X_3$ ) dan variabel Keserasian Belanja ( $X_4$ ) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ( $Z$ ) adalah sebesar 0.015

Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut :

$$H_a : \rho_{zx1} = \rho_{zx2} = \rho_{zx3} = \rho_{zx4} \neq 0$$

$$H_0 : \rho_{zx1} = \rho_{zx2} = \rho_{zx3} = \rho_{zx4} = 0$$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

$H_a$ : Kinerja keuangan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat

Ho: Kinerja keuangan tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Diperoleh nilai probabilitas (sig) = 0.004, karena nilai sig < 0.05 maka Ho ditolak yang artinya signifikan, dan jika menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 50,380 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari df1 (4) dan df2 (3) adalah 6,59. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka Ho ditolak yang artinya signifikan, dan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

### **Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Z Melalui Variabel Y**

Dari hasil perhitungan SPSS diatas terdapat 2 persamaan :

$$P_{zx} = a + Pzx1 + Pzx2 + Pzx3 + Pzx4$$

$$P_{xyz} = a + Pzy1x1 + Pzy2x2 + Pzy3x3 + Pzy4x4 + Pzy1x1y + Pzy2x2y + Pzy3x3y + Pzy4x4y$$

Nilai R2 pada regresi pertama sebesar 0,890 atau 89% sedangkan setelah ada persamaan regresi kedua nilai R naik sebesar 0,994 atau 99,4%. Dan jika menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  untuk regresi yang pertama diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 48,527 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari df1 (1) dan df2 (6) adalah 5,99. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka Ho ditolak yang artinya signifikan, dan hasil regresi yang kedua jika dengan menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 62,142 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari df1 (5) dan df2 (2) adalah 5,79. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka Ho ditolak yang artinya signifikan, Dari kedua regresi diatas sama-sama menunjukkan nilai signifikansi  $0,05 > sig$  maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kinerja keuangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

### **Uji hipotesis**

1. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial
  - a) Pengaruh kemandirian ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y)

Dari tabel diatas dapat dibuat hipotesis statistiknya sebagai berikut :

$$H_a : P_{x1y} \geq 0$$

$$H_o : P_{x1y} \leq 0$$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :



- Ha : Kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka  
Ho : Kemandirian berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Diperoleh kesimpulan bahwa : jika menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 45,114 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari df1 (1) dan df2 (6) adalah 5,99. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka Ho ditolak yang artinya signifikan, dan melihat tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau  $0,05 \geq 0,001$  yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak. Yang artinya bahwa kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

b) Pengaruh Efektivitas ( $X_2$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Dari tabel diatas dapat dibuat hipotesis statistiknya sebagai berikut :

Ha :  $Px_2y \geq 0$

Ho :  $Px_2y \leq 0$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

Ha : Efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Ho : Efektivitas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Diperoleh kesimpulan bahwa : jika menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 45,114 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari df1 (1) dan df2 (6) adalah 5,99. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka Ho ditolak yang artinya signifikan, maka efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan bahwa hasil Signifikansi lebih besar dari 0,05 atau  $0,05 \geq 0,001$  yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak.

c) Pengaruh efisiensi ( $X_3$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y)

Dari tabel diatas dapat dibuat hipotesis statistiknya sebagai berikut :

Ha :  $Px_3y \geq 0$

Ho :  $Px_3y \leq 0$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

Ha : Efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Ho : Efisiensi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Diperoleh kesimpulan bahwa : efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan bahwa hasil Signifikansi lebih besar dari 0,05 atau  $0,05 \geq 0,001$  yang artinya  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

d) Pengaruh keserasian belanja ( $X_4$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Y$ )

Dari tabel diatas dapat dibuat hipotesis statistiknya sebagai berikut :

$$H_a : P_{x_4y} \geq 0$$

$$H_o : P_{x_4y} \leq 0$$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

$H_a$  : Keserasian belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

$H_o$  : Keserasian belanja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Bahwa : jika menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 45,114 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari  $df_1$  (1) dan  $df_2$  (6) adalah 5,99. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_o$  ditolak yang artinya signifikan, keserasian belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan bahwa hasil Signifikansi lebih besar dari 0,05 atau  $0,05 \geq 0,001$  yang artinya  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

2. Pengaruh Kinerja Keuangan ( $X$ ) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ( $Z$ )  
Secara Parsial

a) Pengaruh kemandirian ( $X_1$ ) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat ( $Z$ )

Dari tabel diatas dapat dibuat hipotesis statistiknya sebagai berikut :

$$H_a : P_{x_1z} \geq 0$$

$$H_o : P_{x_1z} \leq 0$$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

$H_a$  : Kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

$H_o$  : Kemandirian berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Diperoleh kesimpulan bahwa : jika menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 48,527 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari  $df_1$  (1) dan  $df_2$  (6) adalah 5,99. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_o$  ditolak yang artinya signifikan, jadi kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan

masyarakat, dan hal ini juga dibuktikan bahwa hasil Signifikansi lebih besar dari 0,05 atau  $0,05 \geq 0,00$  yang artinya  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

b) Pengaruh efektivitas (X2) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Z)

Dari tabel diatas dapat dibuat hipotesis statistiknya sebagai berikut :

$$H_a : P_{X2Z} \geq 0$$

$$H_o : P_{X2Z} \leq 0$$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

$H_a$  : Efektivitas berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

$H_o$  : Efektivitas berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Jika menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 48,527 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari df1 (1) dan df2 (6) adalah 5,99. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_o$  ditolak yang artinya signifikan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa : efektivitas berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan bahwa hasil Signifikansi lebih besar dari 0,05 atau  $0,05 \geq 0,00$  yang artinya  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

c) Pengaruh efisiensi (X3) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Z)

Dari tabel diatas dapat dibuat hipotesis statistiknya sebagai berikut :

$$H_a : P_{X3Z} \geq 0$$

$$H_o : P_{X3Z} \leq 0$$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

$H_a$  : Efisiensi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

$H_o$  : Efisiensi berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Jika menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 48,527 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari df1 (1) dan df2 (6) adalah 5,99. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_o$  ditolak yang artinya signifikan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa : efisiensi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini juga dibuktikan bahwa hasil Signifikansi lebih besar dari 0,05 atau  $0,05 \geq 0,00$  yang artinya  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

d) Pengaruh keserasian belanja (X4) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Z)

Dari tabel diatas dapat dibuat hipotesis statistiknya sebagai berikut :

Ha:  $P_{x4z} \geq 0$

Ho:  $P_{x4z} \leq 0$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

Ha: Keresasian belanja berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Ho: Keresasian belanja berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Jika menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 48,527 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari df1 (1) dan df2 (6) adalah 5,99. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  maka Ho ditolak yang artinya signifikan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa : keresasian belanja berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini juga dibuktikan bahwa hasil Signifikansi lebih besar dari 0,05 atau  $0,05 \geq 0,00$  yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak.

### 3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Z)

Dari tabel diatas dapat dibuat hipotesis statistiknya sebagai berikut :

Ha :  $P_{yz} \geq 0$

Ho :  $P_{yz} \leq 0$

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

Ha : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Ho : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka

Jika menggunakan  $F_{hit}$  dan  $F_{tabel}$  diperoleh nilai  $F_{hit}$  sebesar 40,687 dan  $F_{tabel}$  yang didapat dari df1 (1) dan df2 (6) adalah 5,99. Dapat dilihat bahwa  $F_{hit}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka Ho ditolak yang artinya signifikan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa : pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini juga dibuktikan bahwa hasil Signifikansi lebih besar dari 0,05 atau  $0,05 \geq 0,001$  yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2007 -

2014, baik secara simultan maupun secara parsial. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini diukur dengan empat rasio keuangan Pemerintah Daerah. Keempat rasio tersebut adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja.
  - a. Hasil penelitian dari uji deskriptif rasio kemandirian tertinggi berada ditahun 2014 yaitu sebesar 10,30% dan rasio kemandirian terendah berada di tahun 2008 sebesar 5,41%. Nilai kemandirian untuk tahun 2007-2014 sebesar 7,15% dan tergolong kategori kemandirian yang rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif, artinya kemandirian Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka masih didominasi oleh campur tangan dari Pemerintah Pusat/Provinsi.
  - b. Hasil penelitian dari uji deskriptif rasio efektivitas tertinggi berada ditahun 2007 yaitu sebesar 101,77% dan rasio efektivitas keuangan terendah berada di tahun 2008 sebesar 98,83%. Nilai efektivitas untuk tahun 2007-2014 rata-rata sebesar 100,41 % dan tergolong kategori sangat efektif.
  - c. Hasil penelitian dari uji deskriptif rasio efisiensi tertinggi berada ditahun 2011 yaitu sebesar 97,72% dan rasio efisiensi keuangan terendah berada di tahun 2013 sebesar 92,67%. Nilai efisiensi untuk tahun 2007-2014 rata-rata sebesar 95,45 % dan tergolong kategori cukup efisien.
  - d. Hasil penelitian dari uji deskriptif rasio keserasian belanja tertinggi berada ditahun 2007 yaitu sebesar 47,79% dan rasio keserasian belanja terendah berada di tahun 2010 sebesar 29,06%. Nilai keserasian belanja untuk tahun 2007-2014 rata-rata sebesar 38,28 % dan tergolong kategori kurang serasi.
- 2) Hasil uji hipotesis deskriptif untuk pertumbuhan ekonomi yang dihitung melalui rumus produk domestik regional bruto (PDRB) adalah bahwa nilai tertinggi pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dari tahun 2007-2014 berada ditahun 2007 dan 2013 sebesar 4,87% dan pertumbuhan ekonomi terendah berada di tahun 2014 sebesar 4,11%. Sedangkan rata-rata

- pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu 8 tahun yaitu dari tahun 2007-2014 sebesar 4,65%
- 3) Hasil uji hipotesis deskriptif untuk tingkat kesejahteraan masyarakat yang dihitung melalui rumus indeks pembangunan manusia (IPM) adalah bahwa nilai tertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dari tahun 2007-2014 berada ditahun 2014 sebesar 72,54% dan tingkat kesejahteraan masyarakat terendah berada di tahun 2007 sebesar 68,94%. Sedangkan rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu 8 tahun yaitu dari tahun 2007-2014 sebesar 70,62%.
  - 4) Dari hasil uji hipotesis verifikatif untuk pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan nilai probabilitas sebesar 0,002
  - 5) Dari hasil uji hipotesis verifikatif untuk pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara simultan , dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan nilai probabilitas sebesar 0,004
  - 6) Dari hasil uji hipotesis verifikatif untuk pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
  - 7) Dari hasil uji hipotesis pengaruh kinerja keuangan (dimana kinerja keuangan ini diukur oleh rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi dan keserasian belanja) terhadap pertumbuhan ekonomi maka hasil uji hipotesis secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut :
    - a. Dari hasil uji hipotesis untuk pengaruh kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi, kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,001.

- 
- b. Dari hasil uji hipotesis untuk pengaruh efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi, efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,001.
  - c. Dari hasil uji hipotesis untuk pengaruh efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi, efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,001.
  - d. Dari hasil uji hipotesis untuk pengaruh keserasian belanja terhadap pertumbuhan ekonomi, keserasian belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,001.
- 8) Dari hasil uji hipotesis untuk pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara parsial, dapat diperoleh kesimpulan bahwa :
- a. Kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,000.
  - b. Efektivitas berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,000.
  - c. Efisiensi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,000.
  - d. Keserasian belanja berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan bahwa hasil signifikansi sebesar 0,000.
- 9) Hasil uji hipotesis untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Halim, Abdul. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFYogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, CV.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia

#### **Riwayat Hidup:**

**Kartika Berliani, SE., M.M.** Pendidikan Terakhir S2, Sekarang menjadi Dosen Tetap di STIE INABA.